



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABD. HALIM ISKANDAR**
2. Jabatan : **MENTERI**
3. NHK : **38989**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.661.210.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/45 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 46.200.000
2. Tanah Seluas 1.235 m² di KAB / KOTA JOMBANG, WARISAN Rp. 218.595.000
3. Tanah Seluas 513 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 61.560.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 810 m²/250 m² di KAB / KOTA JOMBANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 106.200.000
5. Tanah Seluas 765 m² di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 541.600.000
6. Tanah Seluas 845 m² di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 49.855.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/90 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 631.200.000
8. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/74 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 778.800.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000



11. Tanah Seluas 209 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI
Rp. 547.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 135.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 688.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.385.787.691

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.873.997.691

III. HUTANG Rp. 351.167.640

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.522.830.051

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.